

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pelayanan Publik sebagai Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Indrajit, 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya mengharapkan pelayanan yang cepat, tetapi juga pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, serta mudah diakses tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. (United Nation, 2024) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melakukan transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui

pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta memperluas partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Menurut (Indrajit, 2016), pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah melalui penerapan Electronic Government (E-Government). Menurut (Indrajit, 2006), E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, maupun antarinstansi pemerintah. Penerapan E-Government tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi sebagai sarana administratif, tetapi juga bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, partisipatif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, (UNDP, 2012) menjelaskan bahwa E-Government merupakan instrumen penting dalam mendukung reformasi sektor publik melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Di Indonesia, penerapan Electronic Government (E-Government) terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018) yang mengatur penyelenggaraan

pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong setiap instansi untuk mengintegrasikan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan E-Government di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai bentuk modernisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018)

2. Website sebagai Media Pelaksanaan E-Government

Penerapan E-Government tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga telah diarahkan hingga pada tingkat pemerintahan desa sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 86, yang mengatur bahwa desa berhak memperoleh akses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia, yang dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan desa bukan lagi sekadar inovasi, melainkan telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung oleh regulasi sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1

KEPEMILIKIAN WEBSITE KAB. BOJONEGORO

No	Kategori Desa	Jumlah Desa	Sumber/Keterangan
1	Total desa di Kabupaten Bojonegoro	419	Data administrasi desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
2	Desa yang memiliki <i>Website</i> Desa (<i>Webdes</i>)	105	Berdasarkan laporan BeritaBojonegoro.com (Permadi, 2017)
3	Desa yang diperkirakan belum memiliki <i>Website</i> Desa	314	Hasil perhitungan berdasarkan selisih total desa dan desa yang memiliki <i>Webdes</i>

Sumber: Beritabojonegoro.com, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, Kabupaten Bojonegoro memiliki sebanyak 419 desa, namun baru 105 desa yang telah memiliki *Website* Desa (*Webdes*), sedangkan sekitar 314 desa diperkirakan belum memiliki *Website*. Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Website* desa sebagai salah satu bentuk penerapan *E-Government* di tingkat pemerintahan desa masih belum menjangkau seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya digitalisasi pemerintahan desa masih memerlukan pengembangan agar pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan secara lebih merata. Di sisi lain, keberadaan *Website* desa tidak hanya diukur dari jumlah desa yang telah memilikinya, tetapi juga dari sejauh mana *Website* tersebut dikelola secara optimal untuk menyediakan informasi, meningkatkan transparansi, serta mendukung pelayanan publik kepada masyarakat (United Nation, 2024).

3. Website Desa

Website Desa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyebaran informasi, serta pelayanan kepada masyarakat melalui media digital. Keberadaan Website Desa merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban mengembangkan sistem informasi desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, Website Desa tidak hanya menjadi media publikasi informasi, tetapi juga menjadi salah satu sarana yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2018).

Dalam penyelenggaraan E-Government, Website Desa memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sekadar media penyampaian informasi kepada masyarakat. Website Desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebarluasan informasi publik, media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta pendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Melalui website, pemerintah desa dapat menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan secara lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, website juga dapat menjadi media interaksi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, maupun membangun komunikasi dengan pemerintah desa melalui berbagai fitur yang tersedia. Menurut (Indrajit, 2006), pelaksanaan E-Government berkembang melalui tiga tahapan utama, yaitu Publish sebagai penyediaan informasi, Interact sebagai komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta Transact sebagai penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, keberadaan Website Desa diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Website tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi informasi, tetapi juga menjadi sarana yang memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (F. Akbar, 2019) menjelaskan bahwa Website Desa

berperan sebagai media informasi pemerintahan dan pembangunan desa yang mendukung keterbukaan informasi publik. Sementara itu, (Helmi et al., 2024) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan website pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan informasi yang disajikan, tetapi juga oleh optimalisasi fitur komunikasi serta dukungannya terhadap pelayanan berbasis digital. Oleh karena itu, Website Desa menjadi salah satu media penting dalam pelaksanaan E-Government yang mendukung fungsi informasi, komunikasi, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan desa.

4. Kondisi Website Desa Ngumpakdalem

Salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah memiliki *Website* Desa adalah Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander. Keberadaan *Website* tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ngumpakdalem telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, keberadaan *Website* saja belum dapat menjadi indikator bahwa implementasi *E-Government* telah berjalan secara optimal. Keberhasilan implementasi *E-Government* juga dipengaruhi oleh pengelolaan *Website* yang berkelanjutan, penyediaan informasi yang mutakhir, serta pemanfaatan fitur-fitur *Website* untuk mendukung komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat (Musthofa et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pengamatan lebih lanjut terhadap kondisi *Website* Desa Ngumpakdalem untuk mengetahui bagaimana implementasi *E-Government* telah dilaksanakan melalui *Website* desa tersebut.

Tabel 2

OBSERVASI AWAL WEBSITE DESA NGUMPAKDALEM

No	Aspek yang Diamati	Kondisi <i>Website</i> Desa
1	Ketersediaan <i>Website</i> Desa	<i>Website</i> desa tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat
2	Pembaruan Berita dan Kegiatan	Berita dan kegiatan desa menunjukkan pembaruan berdasarkan tanggal publikasi terbaru
3	Profil Desa (Visi, Misi, Sejarah)	Informasi profil desa tersedia, namun tidak ditemukan keterangan waktu pembaruan

4	Data Kelembagaan Desa	Tidak ditemukan informasi rinci mengenai data kelembagaan desa pada <i>Website</i>
5	Transparansi Anggaran Desa	Informasi anggaran tersedia hingga tahun 2020 dan tidak ditemukan data tahun berikutnya
6	Informasi PPID	Tersedia menu PPID, namun dokumen yang ditampilkan merupakan data lama
7	Layanan Administrasi Digital	Tidak ditemukan layanan administrasi desa yang dapat diproses secara daring
8	Fitur Interaksi Masyarakat	Tidak tersedia fitur pengaduan atau komunikasi dua arah
9	Informasi Pengelolaan <i>Website</i>	Tidak ditemukan keterangan mengenai mekanisme atau sistem pengelolaan <i>Website</i>
10	Pola Pemanfaatan <i>Website</i>	<i>Website</i> lebih berfungsi sebagai media penyampaian informasi satu arah

Sumber: Diolah penulis (2026).

Berdasarkan hasil observasi pada *Website* Desa Ngumpakdalem sebagaimana disajikan dalam Tabel 2, diketahui bahwa *Website* desa telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai media penyampaian informasi. Namun demikian, pemanfaatan *Website* masih menunjukkan beberapa keterbatasan, seperti belum diperbaruinya informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dokumen PPID yang masih menampilkan data lama, serta belum tersedianya informasi mengenai mekanisme pengelolaan *Website*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan *Website* belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yulianti et al., 2025). yang menyatakan bahwa implementasi *E-Government* di tingkat desa memerlukan pengelolaan yang berkesinambungan agar mampu mendukung penyediaan informasi yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain aspek penyediaan informasi, hasil observasi juga menunjukkan bahwa *Website* Desa Ngumpakdalem belum menyediakan layanan administrasi desa yang dapat diakses secara daring serta belum memiliki fitur komunikasi dua arah, seperti layanan pengaduan atau konsultasi masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan *Website* lebih berfungsi sebagai media penyampaian informasi satu arah daripada sebagai sarana pelayanan publik berbasis digital. Padahal, implementasi *E-Government* di tingkat desa tidak hanya bertujuan untuk

menyediakan informasi, tetapi juga mendukung komunikasi yang efektif serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara elektronik. Hasil penelitian Musthofa, Lukito, dan Suhindarno menunjukkan bahwa optimalisasi *Website* desa memerlukan pemanfaatan fitur-fitur digital yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan demikian, belum optimalnya pemanfaatan fitur pelayanan dan interaksi pada *Website* Desa Ngumpakdalem menunjukkan bahwa implementasi *E-Government* masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

5. Fenomena Pelaksanaan E-Government

Meskipun Pemerintah Desa Ngumpakdalem telah memanfaatkan *Website* Desa sebagai salah satu media digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan masih terdapat beberapa fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. *Website* Desa telah menyediakan berbagai menu informasi mengenai pemerintahan desa, pembangunan, pelayanan, serta informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan *Website* Desa sebagai media pelaksanaan E-Government masih memperlihatkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan penyediaan informasi publik, komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta pelayanan publik berbasis digital. Menurut (Helmi et al., 2024), keberhasilan pengelolaan website pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya platform digital, tetapi juga dipengaruhi oleh pengelolaan konten, pemanfaatan fitur website, serta partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan digital. Oleh karena itu, fenomena yang ditemukan pada *Website* Desa Ngumpakdalem menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan indikator Publish, Interact, dan Transact menurut Indrajit (2006).

Berdasarkan hasil observasi awal, fenomena pertama yang ditemukan berkaitan dengan penyediaan informasi publik melalui *Website* Desa. *Website* Desa Ngumpakdalem telah

menyediakan berbagai informasi mengenai profil desa, pemerintahan desa, berita, kegiatan, serta informasi pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun demikian, peneliti masih menemukan beberapa submenu yang belum terisi secara lengkap dan pembaruan informasi yang belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat juga masih didukung melalui media lain, seperti Instagram, grup WhatsApp, banner, maupun forum pertemuan warga. Menurut (Akbar et al., 2019), Website Desa berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan desa yang mampu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, (Musthofa et al., 2024) menjelaskan bahwa efektivitas Website Desa sebagai media informasi dipengaruhi oleh konsistensi pembaruan konten, kelengkapan informasi, serta pengelolaan website yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut terkait pelaksanaan penyediaan informasi publik melalui Website Desa Ngumpakdalem.

Selain penyediaan informasi, hasil observasi awal juga menunjukkan adanya fenomena yang berkaitan dengan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui Website Desa. Meskipun Website Desa telah menyediakan menu kontak dan terhubung dengan media sosial pemerintah desa, masyarakat masih lebih sering memanfaatkan grup WhatsApp maupun berkomunikasi secara langsung dengan perangkat desa untuk memperoleh informasi atau menyampaikan aspirasi. Menurut (Djabbari et al., 2024), penerapan E-Government akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh komunikasi digital yang aktif serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan media elektronik yang disediakan pemerintah. Senada dengan itu, (Helmi et al., 2024) menyatakan bahwa keberadaan fitur komunikasi pada website pemerintahan perlu diimbangi dengan pemanfaatan yang optimal agar website mampu berfungsi sebagai media interaksi, bukan hanya sebagai media penyampaian informasi. Fenomena tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan E-Government pada Pemerintah Desa Ngumpakdalem.

Di sisi lain, hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa pemanfaatan Website Desa dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital masih menjadi perhatian. Website Desa telah menyediakan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi sehingga masyarakat dapat mengetahui alur pelayanan sebelum datang ke kantor desa. Namun demikian, proses pelayanan administrasi masih dilakukan secara langsung dan belum didukung oleh fitur pelayanan elektronik yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan atau mengakses layanan secara daring. (Kadja & Zega et al., 2026) menjelaskan bahwa website pelayanan publik seharusnya tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga mendukung penyelenggaraan pelayanan secara elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Sejalan dengan itu, (Yulianti et al., 2025) menyatakan bahwa penerapan E-Government pada pemerintahan desa diarahkan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi fenomena yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

6. Urgensi Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terjadi, hasil observasi awal, serta kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan *E-Government* pada pemerintah desa melalui Website Desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana implementasi *E-Government* pada Website Desa Ngumpakdalem telah berjalan berdasarkan indikator Publish, Interact, dan Transact menurut (Indrajit, 2016), serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian *E-Government*, khususnya pada tingkat pemerintahan desa.

Selain memberikan kontribusi secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Ngumpakdalem dalam

mengoptimalkan pengelolaan Website Desa sebagai media informasi, interaksi, dan pelayanan publik berbasis digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas implementasi *E-Government* di tingkat desa sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Desa melalui Website Desa (Studi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).”

B. Rumusan Masalah

Menurut (Sugiyono, 2020), rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data. Rumusan masalah menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah penelitian, sehingga proses pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan tetap berfokus pada permasalahan yang diteliti. Dengan adanya rumusan masalah, peneliti memiliki batasan yang jelas mengenai fokus penelitian, sekaligus memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Desa melalui *Website* Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dalam suatu penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut,

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Desa melalui Website Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan pelayanan publik berbasis digital di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.. Analisis tersebut difokuskan pada pelaksanaan *E-Government* melalui Website Desa berdasarkan indikator *Publish*, *Interact*, dan *Transact* menurut Indrajit, sehingga dapat diketahui sejauh mana Website Desa telah berfungsi sebagai media penyampaian informasi, interaksi, dan pelayanan publik berbasis digital.

2. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian tidak hanya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian mengenai pelaksanaan *E-Government* melalui Website Desa Ngumpakdalem diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan kajian ilmiah serta menjadi masukan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis digital. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian *E-Government* di tingkat pemerintahan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pelaksanaan *E-Government* melalui Website Desa berdasarkan indikator *Publish*, *Interact*, dan *Transact* menurut (Indrajit, 2006). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam memahami implementasi transformasi digital pada pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan informasi publik, interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta pelayanan publik berbasis digital.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Ngumpakdalem

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Ngumpakdalem dalam mengoptimalkan pelaksanaan *E-Government* melalui Website Desa. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan website, penyediaan informasi publik, penguatan komunikasi dengan masyarakat, serta pengembangan pelayanan publik berbasis digital sehingga Website Desa dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan *E-Government* melalui Website Desa Ngumpakdalem. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan Website Desa sebagai media untuk memperoleh informasi publik, berkomunikasi dengan pemerintah desa, serta mendukung pelayanan publik berbasis digital yang lebih mudah, cepat, dan terbuka.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus kajian mengenai *E-Government*, pengelolaan Website Desa, maupun digitalisasi pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup, pendekatan, maupun objek penelitian yang lebih luas sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang pemerintahan digital.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan peneliti untuk mengkaji dan menelaah penelitian yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Desa melalui Website Desa (Studi**

di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)”, maka perlu diuraikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai isi penelitian. Sistematika penulisan ini disusun agar pembahasan penelitian dapat dipahami secara runtut, terarah, dan sistematis. Adapun penjelasan dari setiap bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang memuat uraian mengenai latar belakang penelitian sebagai dasar pemilihan topik penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan fenomena mengenai pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Desa melalui *Website* Desa, didukung dengan kondisi empiris *Website* Desa Ngumpakdalem, hasil observasi awal, penelitian terdahulu, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan meliputi konsep analisis, konsep *E-Government*, konsep pemerintahan desa, konsep *Website* dan *Website* Desa, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan indikator *Publish*, *Interact*, dan *Transact* menurut Indrajit yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Desa melalui *Website* Desa di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan

keabsahan data. Seluruh metode yang digunakan disusun agar mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara sistematis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan indikator *Publish*, *Interact*, dan *Transact* menurut Indrajit untuk mengetahui pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Desa melalui *Website* Desa. Selanjutnya, hasil analisis dibahas dengan mengaitkan temuan penelitian terhadap teori yang digunakan serta penelitian terdahulu yang relevan sehingga diperoleh pembahasan yang komprehensif mengenai kondisi pelaksanaan *E-Government* di lokasi penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Ngumpakdalem dalam mengoptimalkan pelaksanaan *E-Government* melalui *Website* Desa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa.